

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pengalihan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pusat ke daerah merupakan tambahan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah sesuai Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang dituangkan kedalam Peraturan Bupati Kabupaten Sanggau Nomor 34 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sanggau akan menambah Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil pembayaran pajak bumi dan bangunan oleh masyarakat tersebut diharapkan akan dapat membiayai pembangunan daerah. Meskipun pajak bumi dan bangunan dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan daerah, namun dalam realisasinya pemungutan pajak bumi dan bangunan masih sulit dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat pengetahuan, kesadaran, dan kemauan masih rendah.

Martin Fishbein dan Icek Ajzen (dalam Ajzen, 2006) yang menulis buku-buku mengenai Beliefs, Attitude, and Behavior yang lebih di kenal dengan *Theory Of Perceived Behavior* (TPB), dengan menggunakan pendekatan mathematical yang dapat mengungkap dengan lebih jitu mengenai sikap seseorang terhadap perilaku dengan lebih tepat, seperti; pengetahuan akan peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan kondisi keuangan pribadi, yang menuntun kemauan seseorang untuk membayar pajak.

Theory Of Perceived Behavior (TPB) menjelaskan bagaimana sikap seseorang tentang persepsi, kemauan dan kemampuan yang dilihat dari kesadaran, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan dan kondisi keuangan yang di nilai dari pendapatan dan pengeluaran seseorang.

Pembangunan dalam memacu pertumbuhan ekonomi menurut Rostow (Todaro, 2011:135) teransisi keterbelakangan menuju negara maju harus melibatkan semua lapisan masyarakat sebagai dimensi perekonomian yang dapat menggeneralisasi suatu observasi atas fakta tertentu yang semuanya memiliki logika yang kuat dan berkesinambungan untuk itu dituntut sikap masyarakat atas kemampuan dan kemauan dalam pembayaran pajak dengan mengikuti seperangkat aturan pembangunan tertentu untuk lepas landas menuju masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Disamping pembangunan ekonomi menurut Rostow berarti adanya perubahan suatu proses yang berakibat perubahan orientasi ekonomi, politik dan sosial. Perubahan pandangan masyarakat terhadap keluarga, jumlah anak dan tingkat kesehatan. Perubahan tingkat investasi yang tidak produktif (menumpuk emas dan tanah) menjadi investasi yang lebih produktif dan perubahan sikap hidup

dan adat istiadat. Diharapkan perubahan-perubahan tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, kesadaran, pengetahuan dan kemauan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak yang ditanggungnya sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik.

Prinsip kemampuan membayar menjelaskan bahwasanya setiap orang harus membayar pajaknya sesuai dengan kemampuan untuk membayar. Karena prinsip ini harus menggunakan suatu ukuran yang operasional untuk mengukur kemampuan membayar pajak. Alat ukur yang dipakai dalam prinsip ini, yaitu : pendapatan dan pengeluaran konsumsi.

Faktor penghasilan juga dijadikan salah satu alasan masyarakat tidak patuh. Seperti yang diungkapkan oleh Nurmanto (2003:149), bila seorang bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka secara naluriah uang itu pertamanya ditujukkannya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Tapi pada saat yang bersamaan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu timbul kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan kepada Daerah. Disini timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Daerah. Pada umumnya kepentingan untuk pribadi dan keluarga yang selalu dimenangkan.

Masyarakat akan lebih cenderung berpikir bahwa penghasilan yang mereka peroleh sudah tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka, apalagi harus disisihkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Realita semacam itulah yang menjadi penghalang terwujudnya kemauan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga faktor penghasilan masyarakat ini dapat berpengaruh terhadap kemauannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan baik positif maupun negatif.

1.2. Permasalahan

Bedasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana capaian realisasi pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dari Tahun 2010 sampai dengan 2015?
2. Apakah kesadaran membayar PBB-P2 berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar PBB-P2 di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau?
3. Apakah pengetahuan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar PBB-P2?
4. Apakah kondisi keuangan pribadi berpengaruh terhadap kemauan membayar PBB-P2 di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau?

5. Apakah kesadaran, pengetahuan dan kondisi keuangan pribadi berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar PBB-P2 di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui permasalahan Realisasi pembayaran PBB di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dari Tahun 2010 sampai dengan 2015.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara kesadaran membayar pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak bumi dan bangunan masyarakat Kabupaten Sanggau.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak bumi dan bangunan masyarakat Kabupaten Sanggau.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara kondisi keuangan pribadi terhadap kemauan membayar pajak bumi dan bangunan masyarakat Kabupaten Sanggau.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara kesadaran, pengetahuan dan kondisi keuangan pribadi terhadap kemauan untuk membayar pajak bumi dan bangunan masyarakat Kabupaten Sanggau.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembangunan Ekonomi

Menurut Tambunan (2001:72) pembangunan ekonomi merupakan ekonomi yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan, terutama terjadi perubahan tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan dari struktur ekonomi, baik peranannya dalam penyediaan lapangan kerja. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, dengan menjalin pola-pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja, serta dapat merangsang keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi jumlah, produktivitas dan efisien serta didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya fisik secara lokal (daerah).

Pembayaran pajak bumi dan bangunan dari masyarakat merupakan salah satu wujud dari peran serta masyarakat terhadap pembangunan dan sebagai upaya untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih baik dan perubahan tingkat hidup masyarakat menjadi lebih makmur dan sejahtera, sebagaimana yang

dikemukakan Todaro (2011: 251), bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemauan dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan ikut membantu percepatan pembangunan ekonomi daerah, sehingga kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi hal yang utama dalam upaya merealisasikan tujuan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Tambunan (2001:72), bahwa pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumber daya yang ada, dengan menjalin pola-pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja, serta dapat merangsang keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan.

2.2. Otonomi Daerah.

Penerapan otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dilaksanakan dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi luas dimaksudkan bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

2.3. Pendapatan Daerah

Pendapatan menurut Soemarso (2005:230) merupakan “ Peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode tertentu dalam bentuk pemasukan penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Pendapatan suatu daerah sebagian besar dari sektor pajak yang setiap tahunnya diterima. Dalam menentukan pajak suatu daerah atau negara harus mempunyai batas kewenangan yang harus dilakukan agar pemungutan tidak memberatkan wajib pajak dan mempermudah dalam proses pemungutannya.

2.4. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Mahmudi (2010:16) mengemukakan bahwa pada umumnya sumber pendapatan daerah terdiri atas :

A. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu :

- a. Hasil pajak daerah.
 - b. Hasil retribusi daerah.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain berupa bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
 - d. Lain-lain PAD yang sah, antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah, seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah.
- B. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah).
- C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain hibah atau dana darurat dari pemerintah pusat.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam rangka memenuhi prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, kepada daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk membiayai berbagai tugas dan tanggungjawabnya sebagai daerah otonom. Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.5. Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut Kadjatmiko (dalam Kertapraja : 2010) antara lain ialah Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan Pajak parkir.

2.6. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pajak pusat yang merupakan sumber penerimaan Negara. Sebagian besar pajak diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat daerah tempat objek pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah pasal 77, Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta perairan laut Indonesia. Objek pajak bumi dan bangunan adalah sawah, ladang, kebun, tanah

pekarangan, dan pertambahan. Dalam beberapa hal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh, diantaranya:

a. Kemauan Membayar Pajak

Konsep kemauan membayar pajak diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa dan Hari;2009).

Kemauan membayar pajak tak lepas dari *Theory of Planned Behavior* bahwa perilaku seseorang menentukan sikap apa yang akan dia lakukan. Dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Ananda, 2015), yaitu:

- a. *Behavioral Beliefs*
Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
- b. *Normative Beliefs*
Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- c. *Control Beliefs*
Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

b. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti akan hal dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran identik dengan ide/niat yaitu suatu keinginan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi yang menimbulkan kegiatan yang terarah tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya.

c. Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2002:1). Jadi kesimpulannya pengetahuan perpajakan adalah

kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

d. Kondisi Keuangan Pribadi.

Kondisi keuangan berlaku di dalam individu dimana kondisi keuangan individu dapat dijadikan salah satu variabel prediktor yang dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan untuk melaporkan pajaknya (Agustiantono : 2012).

Untuk membangun kepercayaan masyarakat agar lebih mengetahui dan menyadari pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Adam Smith dalam bukunya "*Wealth of Nation*" mengemukakan 4 (empat) teori yang dikenal dengan teori *Four Maxim* :

1. Asas Equality
Asas keseimbangan atau asas keadilan dan didefinisikan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan harus adil, sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak tanpa memihak-mihak dan diskriminatif.
2. Asas Certainty
Asas kepastian hukum dimana setiap pemungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan Undang-Undang dan tidak boleh ada penyimpangan.
3. Asas Convenience of Payment (Asas Kesenangan)
Asas pemungutan pajak yang dilakukan tepat waktu, yaitu pajak dipungut saat wajib pajak berada di saat yang baik dan sedang bahagia, misalnya saat baru menerima penghasilan (pajak penghasilan), memperoleh hadiah (pajak hadiah).
4. Asas Efficiency
Asas Efisiensi adalah biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi biaya administrative pemungutan pajak lebih besar dari pada penerimaan pajak itu sendiri. (Soemitro, 1991 dalam Amanda, 2015)

3. METODE PENELITIAN

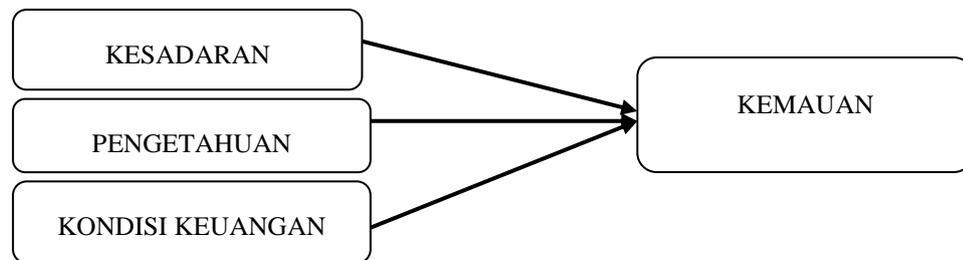
3.1. Bentuk Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian maka penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian kuantitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara kebetulan, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2012; 7).

3.2 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan Kerangka Proses Berpikir dalam prosedur penelitian selanjutnya dibuat ilustrasi penelitian yang dijelaskan melalui Kerangka Konseptual Penelitian dengan penjabaran sebagai berikut:

Gambar 3.3. KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN



3.4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam bentuk kuantitatif atau data yang berbentuk angka dan dapat diukur.

3.5 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut.

- 1) Kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sanggau.
- 2) Pengetahuan akan peraturan tentang pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sanggau.
- 3) Kondisi keuangan pribadi berpengaruh signifikan positif terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sanggau.
- 4) Kesadaran membayar pajak, pengetahuan akan peraturan tentang pajak dan kondisi keuangan pribadi secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sanggau.

3.6. Sampel dan Populasi

Peneliti mengambil sampel sebanyak 50 responden di Kecamatan Kapuas dengan sistem purposive sampling.

Purposive sampling (Sugiono, 2010;85) mengatakan “purposive sampling adalah tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Maksudnya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.

Tujuan dan pertimbangan pengambilan subjek/sampel penelitian ini adalah sampel harus memiliki Penghasilan bulanan yang tetap, Penghasilan tambahan dan Penghasilan tambahan dari pihak lain.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang disampaikan kepada responden untuk mendapatkan informasi dalam pengumpulan data yang

diperlukan yang berhubungan dengan kemauan, kesadaran, pengetahuan/pemahaman dan kondisi keuangan pribadi wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sanggau.

3.8. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuisisioner. Agar data hasil kuesioner yang terkumpul dapat diolah dan dianalisis diperlukan suatu skala pengukuran atas jawaban setiap reponden. Dalam hal ini skala 5 tingkat (*likert*) yang terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kelima pernyataan dalam penelitian ini diberi bobot sebagai berikut.

Tabel 3.1. Pengukuran Terhadap Variabel Independen

NO	URAIAN	SKALA
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Ragu-ragu (RR)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.9. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik yang perhitungannya dilakukan menggunakan SPSS 20.0 dengan analisis regresi linier berganda. Analisis ini bertujuan untuk menentukan seberapa besar pengaruh antara suatu variabel X dengan variabel Y. Dimana variabel X(variabel indepenen) adalah kesadaran (X1), pengetahuan (X2) dan kondisi keuangan pribadi (X3), sedangkan variabel Y (variabel dependen) adalah kemauan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

3.9.1 Uji Kualitas Data

a. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan suatu indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* / *handal* jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011: 47).

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* (pengukuran sekali saja). Disini pengukuran variabelnya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain untuk mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2011: 48).

b. Uji Validitas

Digunakan untuk mengukur sah / valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Caranya dengan membandingkan antara nilai *corraleted item-total correlation* dengan koefisien r tabel. Jika r hitung $>$ r tabel berarti item valid. Sebaliknya jika r hitung $<$ dari r tabel berarti item tidak valid (gugur) (Ghozali, 2011: 52-53).

3.9.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau analisis statistik (Ghozali, 2011: 160).

b. Uji Multikolonieritas

Dalam bukunya (Ghozali, 2011: 105-106) menjelaskan bahwa uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel- variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya.

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/ tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $<$ 0,10 atau sama dengan nilai VIF $>$ 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai *tolerance* = 0,10 sama dengan tingkat kolonieritas 0,95. Walaupun multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai *tolerance* dan VIF, tetapi kita

masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang paling berkolerasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. (Ghozali, 2011: 139-143).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka H_0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka H_0 diterima, yang artinya tidak ada autokorelasi.
3. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan. (Ghozali, 2011:110)

3.9.3 Uji Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan alat uji analisis statistik. Untuk membuktikan hipotesis digunakan alat uji statistik regresi linier berganda. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y : kemauan wajib pajak dalam pembayaran PBB

β_0 : konstanta

$\beta_1 - \beta_3$: koefisien regresi

e : error term

X_1 : kesadaran membayar pajak

X_2 : pengetahuan peraturan perpajakan

X_3 : persepsi kondisi keuangan pribadi

a. Uji F (Simultan)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2011:98). Pengujian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka H_A diterima.
2. Menggunakan signifikan level 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_A diterima, yang berarti koefisien regresi signifikan. Ini berarti bahwa secara simultan kedua variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya.

b. Uji t (Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:99).

Pengujian dilakukan dengan membandingkan signifikansi t-hitung dengan ketentuan:

1. Membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_A diterima.
2. Jika nilai signifikansi t $<$ 0,05, maka H_0 ditolak dan H_A diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. (Ghozali, 2011:97).

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

3.9.4 Operasional Variabel

1. Kemauan Membayar Pajak (Y)

Kemauan membayar pajak adalah suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanesa dan Hari,2009). Variabel ini yang melalui 6 (enam) indikator, dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak, informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak, mendaftarkan sendiri sebagai wajib

pajak, membuat alokasi dana untuk membayar pajak dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

2. Kesadaran membayar pajak (X₁)

Kesadaran membayar pajak merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas membayar pajak dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi kewajiban pajaknya. Variabel ini diukur melalui 6 (enam) indikator yaitu pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan, pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara, pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara dan membayar pajak terbentuknya rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

3. Pengetahuan akan peraturan perpajakan (X₂)

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir dan pemahaman yang merubah tidak tahu peraturan perpajakan menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap praturan perpajakan. Indikator variabel ini adalah pengetahuan tentang pajak diperoleh dari media massa, mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum, mengetahui mengisi SPT dan cara membayar pajak dengan benar, mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang ditanggung, mengetahui adanya Undang-undang yang mengatur tentang keterlambatan, dan mengetahui tentang adanya sanksi bagi yang melanggar.

4. Kondisi keuangan pribadi (X₃)

Untuk mengukur besarnya pendapatan masyarakat secara pribadi yang dinilai melalui penghasilan tertinggi dengan penghasilan terendah yang dirata-ratakan dan dibobotkan menjadi 5 (lima) point 1 - 5 dengan pernyataan :

- a. Penghasilan tetap bulanan
- b. Penghasilan tambahan perbulan
- c. Bantuan penghasilan dari pihak lain
- d. Pengeluaran untuk konsumsi perbulan
- e. Pengeluaran tambahan perbulan
- f. Pengeluaran tak terduga

Menggunakan *Method Of Successive Inrterval (MSI)* Prof.Dr.Imam Ghozali tentang skala Likert, adaptasi dari Saifudin Anwar (Psikologi UGM) judul “ Sikap Manusia” tulisan ilmiah yang terbit tanggal 20 April 2013 :

- | | |
|---------------------------|-------------|
| a. Skor 1 (Rendah) | = 0% - 20% |
| b. Skor 2 (Kurang Tinggi) | = 21% - 40% |
| c. Skor 3 (Cukup Tinggi) | = 41% - 60% |
| d. Skor 4 (Tinggi) | = 61% - 80% |

e. Skor 5(Sangat Tinggi) = 81% - 100%

Cara menentukan dengan :

$$\frac{\text{Nilai Responden}}{\text{Nilai Tertinggi}} \times 100 \%$$

Variabel dalam penelitian ini diukur melalui 24 pertanyaan yang di rangkum dalam kuesioner dengan menggunakan skala interval melalui metode pengukuran sikap likert 5 point, yang berisi lima pilihan, yaitu : “sangat tidak setuju”, “tidak setuju”, “ragu”, “setuju” dan “sangat setuju”, dengan skor “1” sampai dengan “5”. (Adaptasi dari Rahmahwaty, 2011 dan I Wayan Budhiarsana, 2015)

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Kwalitas Data

4.1.1 Uji Reliabel

Tabel 4.1.6.1 Uji Reliabel

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.947	.950	24

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *IBM SPSS Statistic 20* dapat dilihat hasil Cronbach's Alpha senilai 0,947 lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2011). Maka dapat disimpulkan variable dalam penelitian ini reliabel.

4.1.2 Uji Validitas

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *IBM SPSS Statistic 20* dapat dilihat hasil perhitungan table *Corrected Item – Total Correlation* dari hasil uji validitas dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan valid, hal ini terlihat dari nilai r hitung seluruh indikator variabel lebih besar dari rtabel n50, $\alpha 5\% = 0,2787$. Dari tampilan hasil terlihat bahwa korelasi masing- masing indikator terhadap total pada setiap variabel menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Normalitas

Dari gambar grafik *Normal P-P Plot of regression standardized residual* di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal.

4.1.3.2 Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *variance inflation factor* (VIF). Data dikatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila

nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai *VIF* ≤ 10 . Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada kolom *Collinearity Statistics* di Tabel berikut :

Tabel 4.1.6.2
Pengujian Multikolonieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-4.318	.940		-4.596	.000		
X1	.819	.094	.719	8.732	.000	.124	8.043
X2	.094	.035	.080	2.710	.009	.970	1.031
X3	.283	.088	.262	3.199	.002	.126	7.966

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat nilai *Tolerance* pada table *Collinearity Statistics* untuk semua variabel independent bernilai lebih besar dari 0,1 dan nilai *VIF* kurang dari 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, sehingga criteria bebas multikolinearitas terpenuhi dalam model estimasi ini.

4.1.3.3 Heteroskedastisitas

Dasar pengambilan keputusan dalam Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplo menunjukkan bahwa tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam parameter model penduga, dimana nilai signifikansi seluruh variabel lebih dari 0,05 ($p > 0,05$), terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas.

4.1.3.4 Uji Autokorelasi

Tabel 4.1.6.4 Pengujian Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.980 ^a	.961	.959	.81357	1.580

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Nilai Tabel Durbin-Watson dengan nilai table signifikansi 5%, $n = 50$ dan jumlah variabel independent ($K = 3$) diperoleh nilai $dL = 1,4206$ dan $dU = 1.6739$, sehingga diperoleh selang pengambilan keputusan pada Grafik 4.1.7.4 dengan hipotesis :

H_0 : Tidak terdapat autokorelasi

H_1 : Terdapat autokorelasi

Karena diperoleh nilai Statistik Durbin-Watson sebesar 1,580 berada dalam selang $dL < dw < dU$ yaitu daerah tidak ada keputusan, maka H_0 tidak ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria bebas autokorelasi terpenuhi dalam model estimasi ini.

4.1.4. Uji Regresi Linier Berganda

4.1.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.1.7.1
Pengujian Statistik : Model Summary

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.980 ^a	.961	.959	.81357	1.580
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1					
b. Dependent Variable: Y					

Sumber : Data Diolah

Hasil uji model dengan menggunakan *IBM SPSS Statistics 20* menunjukkan nilai *R-squared* sebesar 0,961 yang berarti variable independent mampu menjelaskan variasi variabel dependent sebesar 96,1%. Variasi sisanya sebesar 3,9% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.1.4.2 Uji Hipotesis Koefisien Regresi secara Simultan/Menyeluruh (Uji F)

Hasil uji model dengan menggunakan *IBM SPSS Statistics 20* menunjukkan nilai *F-statistic* sebesar 379,740. Jika dibandingkan dengan nilai *F-table* dengan $K ; n-2$ yaitu sebesar 2,80 maka nilai *F-statistic* (*F* hitung) lebih besar dibanding *F table* yang berarti variable independent secara menyeluruh berpengaruh signifikan terhadap variable dependent.

Tabel 4.1.7.2
Pengujian Statistik : ANOVA

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	754.052	3	251.351	379.740	.000 ^b
	Residual	30.448	46	.662		
	Total	784.500	49			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1						

Sumber : Data Diolah

Dari output *IBM SPSS Statistics 20* tabel ANOVA di atas, nilai table signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari α 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independent secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent.

H_4 = Kesadaran membayar pajak, pengetahuan akan peraturan tentang pajak dan kondisi keuangan pribadi secara simultan berpengaruh signifikan

dengan arah positif terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sanggau.

4.1.7.3 Uji Hipotesis Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)

Tabel 4.1.7.3
Pengujian Statistik : Coefficients

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-4.318	.940		-4.596	.000		
X1	.819	.094	.719	8.732	.000	.124	8.043
X2	.094	.035	.080	2.710	.009	.970	1.031
X3	.283	.088	.262	3.199	.002	.126	7.966

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Diolah

Dari Tabel diatas maka $Y = -4.318 + 0,819 X1 + 0,094 X2 + 0,283 X3$

$H_1 =$ Kesadaran Membayar Pajak (X1) berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y).

Dari hasil analisis regresi dapat dilihat Kesadaran Membayar Pajak (X1) signifikan mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Y). Terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α 0,05.

$H_2 =$ Pengetahuan akan Peraturan Perpajakan (X2) berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y).

Dari hasil analisis regresi dapat dilihat Pengetahuan akan Peraturan Perpajakan (X2) signifikan mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Y). Terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari α 0,05.

$H_3 =$ Kondisi Keuangan Pribadi (X3) berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y).

Dari hasil analisis regresi dapat dilihat Kondisi Keuangan Pribadi (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y). Terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari α 0,05.

4.1.8. Masalah capaian realisasi pembayaran PBBP2 di Kecamatan Kapuas

Permasalahan target PBB-P2 tidak pernah tercapai di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau menurut beberapa Aparat Desa pada lokasi penelitian, dikarenakan :

- a. Adanya objek pajak ganda : satu objek pajak dengan dua SPPT atau dua objek pajak satu SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang).
- b. Objek Pajak yang tidak dikenal : SPPT yang masuk ke desa namun aparat desa tidak mengenal objek pajaknya.
- c. Objek Pajak yang tidak ada : objek pajaknya tidak ada di desa tersebut namun SPPTnya ada di desa tersebut.
- d. Wajib pajak tidak dikenal : SPPTnya ada namun aparat desa tidak mengenal wajib pajak tersebut.
- e. Wajib pajak ganda : ada lebih dari satu nama wajib pajak pada objek pajak yang sama.
- f. Alamat wajib pajak tidak terjangkau (luar kota/kabupaten/propinsi)
- g. Status kepemilikan objek pajak yang tidak jelas
- h. Tarif pajak yang tidak sesuai dengan objek pajak.
- i. Ada pada lokasi penelitian status kepemilikan lahan masih HGU perusahaan tetapi ditanami oleh masyarakat setempat atau status masih hutan lindung sehingga SPPT tidak bisa diterbitkan.

4.1.9. Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan Tabel 4.1.8.3 menunjukkan bahwa variabel independen kesadaran membayar pajak (X1) mempunyai p Value (sig) lebih kecil dari pada 0,05 dalam nilai absolute pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, dengan nilai 0,000. Variabel kesadaran membayar pajak sebesar $0,000 < 0,05$, maksudnya variabel kesadaran berpengaruh signifikan terhadap variabel kemauan secara parsial (H1 diterima).

4.1.10 Pengetahuan akan peraturan tentang PBB-P2 berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan Tabel 4.1.8.3 menunjukkan bahwa variabel independen Pengetahuan akan peraturan tentang PBB-P2 (X2) mempunyai p Value (sig) lebih kecil dari pada 0,05 dalam nilai absolute pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, dengan nilai 0,009. Variabel pengetahuan akan peraturan tentang PBB-P2 sebesar $0,009 < 0,05$, maksudnya variabel pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap variabel kemauan secara parsial (H2 diterima).

4.1.11 Kondisi keuangan pribadi berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan Tabel 4.1.8.3 menunjukkan bahwa variabel independen

kondisi keuangan pribadi (X3) mempunyai p Value (sig) lebih kecil dari pada 0,05 dalam nilai absolute pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, dengan nilai 0,002. Variabel kondisi keuangan pribadi sebesar $0,002 < 0,05$, maksudnya variabel kondisi keuangan pribadi berpengaruh signifikan terhadap variabel kemauan secara parsial (H3 diterima).

4.1.12 Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan tentang pajak dan kondisi keuangan pribadi berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sanggau

Berdasarkan Tabel 4.1.8.2 menunjukkan nilai *F-statistic* sebesar 379,740. Jika dibandingkan dengan nilai *F-table* dengan K ; n-2 yaitu sebesar 2,80 maka nilai *F-statistic* (F hitung) lebih besar dibanding F table yang berarti variable kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan tentang pajak dan kondisi keuangan pribadi secara menyeluruh berpengaruh signifikan terhadap variable kemauan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan. Nilai tabel signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari α 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independent secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent. Berarti variable independent mampu menjelaskan variasi variabel dependent sebesar 96,1%. Variasi sisanya sebesar 3,9% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan, evaluasi dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel kesadaran membayar berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap variabel kemauan secara parsial (H1 diterima). Meningkatnya kesadaran wajib pajak maka semakin besar kemauan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Variabel pengetahuan akan peraturan tentang PBBP2 berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap variabel kemauan secara parsial (H2 diterima). Semakin wajib pajak mengetahui peraturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maka semakin tinggi kemauan wajib pajak membayar pajaknya karena bertambahnya pengetahuan wajib pajak maka wajib pajak makin paham hak dan kewajibannya.
3. Variabel kondisi keuangan pribadi berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap variabel kemauan secara parsial (H3 diterima). Kondisi keuangan secara pribadi wajib pajak mempengaruhi kemauan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), karena dengan kondisi keuangan yang baik, wajib pajak tidak akan merasa keberatan dan akan meningkatkan kemauan membayar pajaknya.

4. Variabel kesadaran, pengetahuan akan peraturan dan kondisi keuangan pribadi secara simultan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap variabel kemauan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Variable independent mampu menjelaskan variasi variabel dependent sebesar 96,1%. Variasi sisanya sebesar 3,9% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Semakin bertambahnya pengetahuan wajib pajak semakin paham pula wajib pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga akan berdampak lebih lanjut pada meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kondisi keuangan dan pendapatan wajib pajak juga berpengaruh pada kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya sehingga perolehan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat ditingkatkan dan menambah Pendapatan Asli Daerah.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau maka penulis memberikan saran bahwa :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada pihak terkait yang senantiasa dihadapkan pada usaha ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di sektor pajak.
2. Perlu disosialisasikan sikap sadar membayar pajak agar masyarakat mau untuk membayar pajak. Sosialisasi ini dapat melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya. Perlu secara berkala Dinas Pendapatan Daerah dan pihak Kecamatan aktif mengadakan acara yang mendidik serta menghibur masyarakat agar memiliki kesadaran untuk membayar kewajiban perpajakan. Sosialisasi di acara tertentu dengan cara mengundang tokoh yang disegani oleh kalangan profesional tertentu.
3. Upaya pelatihan atau sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat membantu meningkatkan kemauan membayar pajak, terutama untuk aparat dan perangkat desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai wajib pajak.
4. Melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada masyarakat baik di bidang pertanian dan kerajinan serta bantuan-bantuan atau subsidi akan sangat membantu pendapatan masyarakat, apabila pendapatan masyarakat meningkat akan meningkat pula kemauan masyarakat membayar pajaknya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membangun daerah itu sendiri.
5. Rekomendasi pada penelitian selanjutnya perlu menambahkan latar belakang pendidikan dan sanksi/denda karena dengan sanksi/denda yang telah ditegaskan dalam peraturan perpajakan diharapkan tingkat kemauan

membayar pajak lebih meningkat. Perlu memperluas wilayah lain agar dapat digeneralisasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih riil tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2).

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel hanya di satu kecamatan, 6 (enam) desa dan 2 (dua) kelurahan sehingga tidak bisa digeneralisir untuk wilayah kecamatan yang lain. Jumlah sampel yang digunakan atas dasar pemilihan responden secara kuota mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, sehingga tidak memperhatikan perbedaan yang menonjol diantara wilayah responden yang diteliti, oleh karena itu hasil penelitian yang diperoleh belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga
- _____ 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- _____ 2007. *Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi*. The 1st National Accounting Conference. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Adelina, Rima. 2013. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gersik*. Jurnal Universitas Negeri Surabaya
- Ajzen, I. (2006). Behavior Intervention Based on the Theory of Planned Behavior. Retrieved July 4, 2006 from <http://www-unix.oit.umass.edu/~ajzen/>
- Ananda. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Pendapatan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating (Studi pada wajib pajak di Kota Medan)*. Tesis. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Atiqa dan Verisca Dena Fitria, 2010. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT*.
- Badrudin Rudi. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Budiarsana. 2015. *Pengaruh Keadilan Distributif dan Penegakkan Sanksi pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran dengan Kepuasan Wajib*

- Pajak sebagai Variabel Pemoderasi. Tesis. Universitas Udayana. Denpasar
- Carolina,V dan T.H. Simanjuntak. 2011. *Pengaruh Tax Knowlegne Dan Persepsi Tex Fairness Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Madya Bandung*. Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliener)”
- _____,Meythi dan Riki Martusa. 2010. *Tax Culture: Dasar Pelaksanaan Reformasi Perpajakan Menuju Kepatuhan Sukarela*. Simposium Nasional Perpajakan III. Bandung.
- Damaiyanti, Ni Putu Dian dan I Putu Ery Setiawan. 2014. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung. Pustaka Setia.
- Djam’an Satori dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.Bandung
- Devano, Sony, Siti Kurnia Rahayu, 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Prenadaka Media Group. Jakarta.
- Erlina. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akutansi dan Manajemen*. Edisi Kedua, USU Press. Medan.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar. 1995. *Ekonometrika Dasar*, terjemahan Sumarno Zain, Erlangga, Jakarta
- _____. 2003. *Basic Econometrics*. Mc Graw Hill, New York.
- Hardiningsi Pancawati, 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (The Factors Influence The Willingness To Pay The Tax)*.
- Husein Umar. 2005. *Metode penelitian Untuk skripsi dan Tesis Bisnis*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press. Jakarta.
- Jogiyanto. 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis*: BPFE Koswara. Yogyakarta
- Jonni Muliardi, 2013. *Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pontianak*. Pontianak, Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura.

- Kertapraja. 2010. Pemerintahan Daerah. Jakarta : Inner Moh. Nazir. 2003. Metode Penelitian: Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Kurniawan, Ardy dan Sentot IW. 2014. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tulungagung*.
- Lincolyn Arsyad. 1999. Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah , Edisi Pertama, BPFE – UGM. Yogyakarta :
- _____. 2010. Ekonomi Pembangunan: UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mahmudi. 2010, Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. Perpajakan Edisi Revisi. Andi Yogyakarta
- Mudrajat Kuncoro. 2000. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan UPP AMP YKPN. Yogyakarta :
- Mudrajat Kuncoro. 2004. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Erlangga. Jakarta :
- Nasution, A., 2013. Tipologi Pedesaan (Pandangan Tentang Ilmu) artikel yang terbit Jumat, 29 Maret 2013.
- Nurmanto, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan Edisi Ketiga. Granit. Jakarta :
- Pemda Kabupaten Sanggau. RPJMD Kabupaten Sanggau 2014 – 2019. Pemda Sanggau.
- Pressman, Steven, 2000. Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia. Murai Kencana, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purwono Herry, 2010. Dasar-Dasar Perpajakan dan Akutansi Pajak. Erlangga, Jakarta.
- Rahmawati, dkk. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi pada wajib pajak pribadi yang memiliki usaha warung kopi di Kota Banda Aceh)*.
- Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro, 2010. Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analisis (Analisis Jalur). Alfabeta. Bandung.
- Sambas Ali Muhidin. 2011. Panduan Praktis Memahami Penelitian. Pustaka Setia. Bandung.
- Setyowati, Endang, Suryawati Karseno, Dkk, Ekonomi Makro Pengantar, Edisi 2. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Soemarso. 2005. Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Soemarsono. S.R., 2007. Perpajakan Pendekatan Komprehensif. Salemba Empat. Jakarta.
- Soemitro Rocmat. 1991. Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum. Eresco. Bandung.

- Sugiyono.2003. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas.
- _____.2004. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung.
- _____.2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sukmadinata, Syaodih Nana. 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- _____.2006. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2010. Statistika untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Jakarta
- Syamsuddin Haris. 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. LIPI Press. Jakarta
- Suharsimi Arikunto. 2000. Manajemen Penelitian. Rineka Cipta. Jakarta
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2011. Pembangunan Ekonomi. Erlangga. Jakarta
- Uma Sakaran, 1992. Research Methods for Busines
- _____, 2006. Metode Penelitian Bisnis. Salemba Empat. Jakarta
- Utomo. 2002. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak. Megister Administrasi Publik. Tesis.Universitas Diponogoro Semarang.
- Voni Lestari. 2014. *Analisis Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2012 dan 2013*. Akuntansi. UNESA.
- Vanessa dan Hari (2009) . *Dampak sunset policy terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Makalah Simposium Nasional Indonesia Perpajakan II*.
- Trisnawati, 2015. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di kota Denpasar. Tesis. Universitas Udayana. Denpasar.
- Widayati dan Nurlis. 2013. *Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Makalah Simposium Nasional Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Akuntansi XIII Purwokerto*.
- Widyawati Rissa, 2013. *Pengaruh Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan di Surakarta)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Unuversitas Muhammadiyah Surakarta.